

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PMK Nomor 34/PMK.04/2020 memenuhi ketentuan berdasarkan perspektif beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut.

1. PMK Nomor 34/PMK.04/2020 memenuhi ketentuan sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UUP3.
2. Kebijakan pembebasan bea masuk dan kepabeanan dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
  - a) PMK Nomor 34/PMK.04/2020 dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan yang mana menjelaskan bahwa perubahan terhadap barang-barang yang dikenai pembebasan Bea Masuk seperti dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan, akan diatur oleh Menteri, atau dalam hal ini melalui Peraturan Menteri.
  - b) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020 sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, pembebasan PPN dan PPn.BM Impor dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020

memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 226/PMK.03/2021 dan Pasal 16B ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn.BM.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengkaji lebih dalam dan lebih teliti mengenai pembentukan regulasi dalam keadaan darurat terkait kualifikasi barang dalam bidang kepabeanan dan cukai yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dengan melakukan riset agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan. Selain itu, diharapkan juga untuk tetap mengawasi arus pendapatan negara melalui kepabeanan dan cukai sehingga tetap terkendali.
2. Bagi masyarakat umum, untuk tetap mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya di masa-masa darurat sebagai bentuk partisipasi masyarakat, sehingga nantinya perekonomian dalam masyarakat juga dapat dikendalikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Kontitusi Press, Jakarta.
- Fariied Ali dan Andi Syamsu Alam. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Widya Karya, Semarang.
- Hestu Cipto Handoyo, B. 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan. 2021. *Kajian Fiskal Regional Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I 2021*. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lailam, Tanto. 2017. *Teori & Hukum Perundang-Undangan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Morya Immanuel Patrio, Yopi. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Keni Media, Bandung.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks: Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purwito, Ali. 2013. *Kepabeanaan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan*. Jelajah Nusa, Tangerang Selatan.
- Ranggawidjaja, Rosidi. 1996. *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Citra Bhakti Akademika, Bandung.
- Sumarsana, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Indeks, Jakarta.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta.
- Yosmic, Daniel. 2021. *Perpu Dalam Teori dan Praktik*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yudhi Setiawan, dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik (dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan)*. Rajagrafindo Persada, Depok.

### Jurnal Hukum

- Admiral Parikesit, Rio. 2018. *Evaluasi Kebijakan Perubahan Penyebutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 No.1 Maret 2018. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, hlm. 101-114
- Apendi, Sofyan. 2021. *Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional*. PALAR Pakuan Law Review Vol. 7 Nomor 1 2021 Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, hlm. 111-126.

- Eva Santi Silalahi, Dina dan Rasinta Ria Ginting. 2020. *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19*. JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol. 3 Nomor 2 Juni 2020 LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga, Tapanuli Tengah. hlm. 156-167.
- Fauziani Deyanputri, Najla. 2020. *Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) Terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK Nomor 199/PMK.10/2019)*. Jurnal Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol.3 Nomor2 Desember 2020, Institut STIAMI, Jakarta, hlm. 149-159.
- Haqiqi, Fauzan, dkk. 2021. *Analisis Pengaruh Realisasi Penerimaan Bea Masuk Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk (pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Periode 2017-2019)*. Jurnal Cafeteria Indonesia Vol. 2 Nomor 1 Januari 2021 Program Studi Akuntansi Universitas Karimun, Tanjung Balai Karimun, hlm. 48-61
- Ramadhani Putri, Fadiyah. 2020. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol. 4 No. 1 April 2020, Surabaya, hlm. 254-270
- Ridwan. 2021. *Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Vol. 18 Nomor 4 Desember 2021, Jakarta, hlm. 828-845
- Supryadi, Ady. 2021. *Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Position of Ministerial Regulation in Review of The Hierarchy of Legislation in Indonesia)*. Unizar Law Review Vol. 4 Issue 2, December 2021. Universitas Islam Al-Azhar, Jakarta, hlm. 146-152.

#### **Artikel Internet**

- Adinda Putri, Cantika. 2021. *Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif> pada 4 Maret 2022 pukul 08.36 WIB
- Aditya, Ivan. 2021. *Kinerja Penerimaan Bea Cukai Yogyakarta Lampau Target*, diakses dari <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/kinerja-penerimaan-bea-cukai-yogyakarta-lampau-target/> pada 15 April 2022 pukul 14.20 WIB
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2020. *Penerimaan Bea Cukai Jogja Capai 60% dari Target Tahunan*, diakses dari <https://beacukai.bisnis.com/read/20200811/468/1277875/penerimaan-bea-cukai-jogja-capai-60-dari-target-tahunan> pada 15 April 2022 pukul 22.19 WIB

- Ekarina. 2020. *Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor Untuk Tangani COVID-19*, diakses dari <https://katadata.co.id/ekarina/finansial/5e9d0718d6964/sri-mulyani-bebaskan-bea-masuk-dan-pajak-impor-untuk-tangani-covid-19> pada 17 September 2021 pukul 15:08 WIB
- Galuh Candra Asmarani, Nora. 2020. *Apa itu Tarif Ad Valorem?*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-tarif-ad-valorem-24839> pada 25 Februari 2022 pukul 00.52 WIB
- Galuh Candra Asmarani, Nora. 2020. *Apa Itu Pajak Dalam Rangka Impor?*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-dalam-rangka-impor-20755> pada 10 Februari 2022 pukul 11.34 WIB  
<https://bctemas.beacukai.go.id/faq/pembebasan-atau-keringanan-bea-masuk-2/> diakses pada 2 Januari 2022 pukul 14.26 WIB.  
<https://covid19.go.id> pada 9 Maret 2022 pukul 18.46 WIB  
<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-dalam-rangka-impor-20755> diakses pada 1 Maret 2022 pukul 23.08 WIB  
<https://www.jawapos.com/ekonomi/07/03/2020/penerimaan-bea-masuk-dan-keluar-turun-55-persen-akibat-virus-korona/> pada 9 Januari 2022 pukul 10.12 WIB.
- Ika Ramadhani, Pipit. 2020. *Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penyebabnya*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4259816/penerimaan-bea-cukai-turun-ini-penyebabnya> pada 7 Maret 2022 pukul 18.38 WIB
- Kementerian Keuangan. 2014. *Kajian Atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik*, diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-bea-dan-cukai-kajian-atas-pengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik-2019-11-05-4e2d8937/> pada 7 Maret 2022 pukul 13.18 WIB
- Kementerian Keuangan. 2020. *Kebijakan Fiskal Pemerintah Yang Pruden Dalam Menghadapi Pandemi*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kebijakan-fiskal-pemerintah-yang-pruden-dalam-menghadapi-pandemi/> pada 25 Februari 2022 pukul 19.27 WIB
- Kementerian Keuangan. 2021. *Kinerja Pelaksanaan APBN di DIY s.d. 31 Mei 2021*, diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/3152-kinerja-pelaksanaan-apbn-di-diy-s-d-31-mei-2021.html> pada 30 Mei 2022 pukul 20.16 WIB
- Kementerian Keuangan. 2021. *Lampaui Target Penerimaan, Bea Cukai Tunjukkan Kinerja yang Baik di Tengah Pandemi*, diakses dari <https://www.beacukai.go.id/berita/lampaui-target-penerimaan-bea-cukai-tunjukkan-kinerja-yang-baik-di-tengah-pandemi.html> pada 11 April 2022 pukul 12.18 WIB
- Kementerian Keuangan. 2021. *Menkeu: Refocusing Anggaran Rp26,2 Triliun untuk Penanganan COVID-19*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-anggaran-rp26-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/> pada 18 Januari 2022 pukul 13.18 WIB.



- Kementerian Keuangan. 2021. *Relaksasi Perpajakan Bantu Dunia Usaha Tetap Bertahan dan Pulih*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/relaksasi-perpajakan-bantu-dunia-usaha-tetap-bertahan-dan-pulih/> pada 29 Oktober 2021 pukul 08.59 WIB
- Kurniati, Dian. 2020. *Ini Realisasi Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor Alat Kesehatan*, diakses dari [https://news.ddtc.co.id/ini-realisisi-pembebasan-bea-masuk--pajak-impor-alat-kesehatan-20472?page\\_y=1160](https://news.ddtc.co.id/ini-realisisi-pembebasan-bea-masuk--pajak-impor-alat-kesehatan-20472?page_y=1160) pada 16 September 2021 pukul 15.27 WIB.
- Kurniati, Dian. 2021. *Fasilitas Perpajakan untuk Impor Vaksin dan Alkes Tembus Rp8 Triliun*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/fasilitas-perpajakan-untuk-impor-vaksin-dan-alkes-tembus-rp8-triliun-35533> pada 9 Januari 2022 pukul 12.28 WIB.
- Miranti Karunia, Ade. 2021. *Dampak PPKM, Kemenaker: Hampir 48 Persen Pekerja Terancam PHK dan Dirumahkan*, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/19/133300426/dampak-ppkm-kemenaker-hampir-48-persen-pekerja-terancam-phk-dan-dirumahkan?page=all> pada 30 Maret 2022 pukul 13.28 WIB
- Puteri Abdi Rabbi, Cahya. 2021. *Penyekatan PPKM Darurat Menghambat Operasional Swalayan dan Minimarket*, diakses dari <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/60e6ed448336f/penyekatan-ppkm-darurat-menghambat-operasional-swalayan-dan-minimarket> pada 28 Maret 2022 pukul 19.40 WIB
- Q., Yusuf. 2018. *FOB dan CIF*, diakses dari <https://bcbojonegoro.beacukai.go.id/fob-dan-cif/> pada 23 Maret 2022 pukul 21.03 WIB
- Sulaeman. 2022. *Pemerintah Terapkan PPKM Level 3, Ini Dampak ke Ekonomi Indonesia*, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-terapkan-ppkm-level-3-ini-dampak-ke-ekonomi-indonesia.html> pada 28 Maret 2022 pukul 19.47 WIB
- Suwiknyo, Edi. 2020. *Banjir Relaksasi Pajak, OECD: Hati-hati Peningkatan Tax Fraud!*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200528/259/1245541/banjir-relaksasi-pajak-oecd-hati-hati-peningkatan-tax-fraud> pada 18 Januari 2022 15.58 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang mana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1697 Tahun 2019).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi

*Coronavirus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 797).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530).

**Lainnya**

Hasil Wawancara dengan Bapak Anas, selaku petugas Layanan Informasi di KPPBC Yogyakarta, pada 14 April 2022 pukul 15:54 WIB  
Data Personalia dan Profil KPPBC Yogyakarta di tahun 2020-2021

